



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati secara garis besar meliputi: Profil Instansi, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (Uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan).

Tujuan LKjIP secara umum adalah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus juga melaporkan kinerja instansi yang menjadi tolok ukur tanggungjawab suatu instansi.

Dengan LKjIP tersebut akan diketahui perkembangan dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati di masa yang akan datang.

Pati, 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI



Ir. EDY MARTANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19590303 199103 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tantangan dan Peluang	13
1.5 Sistematika Penyajian LKjIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	16
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
1. Capaian Kinerja Organisasi	19
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3. Hambatan dan Rencana Aksi	30
4. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan	9
Tabel 1.2 Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	17
Tabel 2.2 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	18
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2020	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2020	21
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2020	25
Tabel 3.4 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020	27
Tabel 3.5 Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020	32



IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerjanya.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

1. Tujuan

“Meningkatnya Daya Saing Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan”

2. Sasaran

- a. *Meningkatnya Produktivitas di sektor Kelautan dan Perikanan dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu Produktivitas Perikanan*

Tangkap, Produktivitas Perikanan Budidaya dan Produktivitas Garam.

- b. *Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk* dengan 1 (satu) indikator utama yaitu Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan.

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2020 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada tahun 2020 ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 207,47%. Hasil ini telah mencapai target sasaran tahun yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 12.685.342.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.318.312.113,00 atau sebesar 97,11%.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan baik dari anggaran APBD maupun APBN. Capaian kinerja ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKjIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan,

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;

- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan mengimplementasikan SAKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

1.2 Data Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
 1. Seksi Sarana Prasarana, Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan;
 2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Pembudidaya Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayanan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayanan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayanan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perijinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

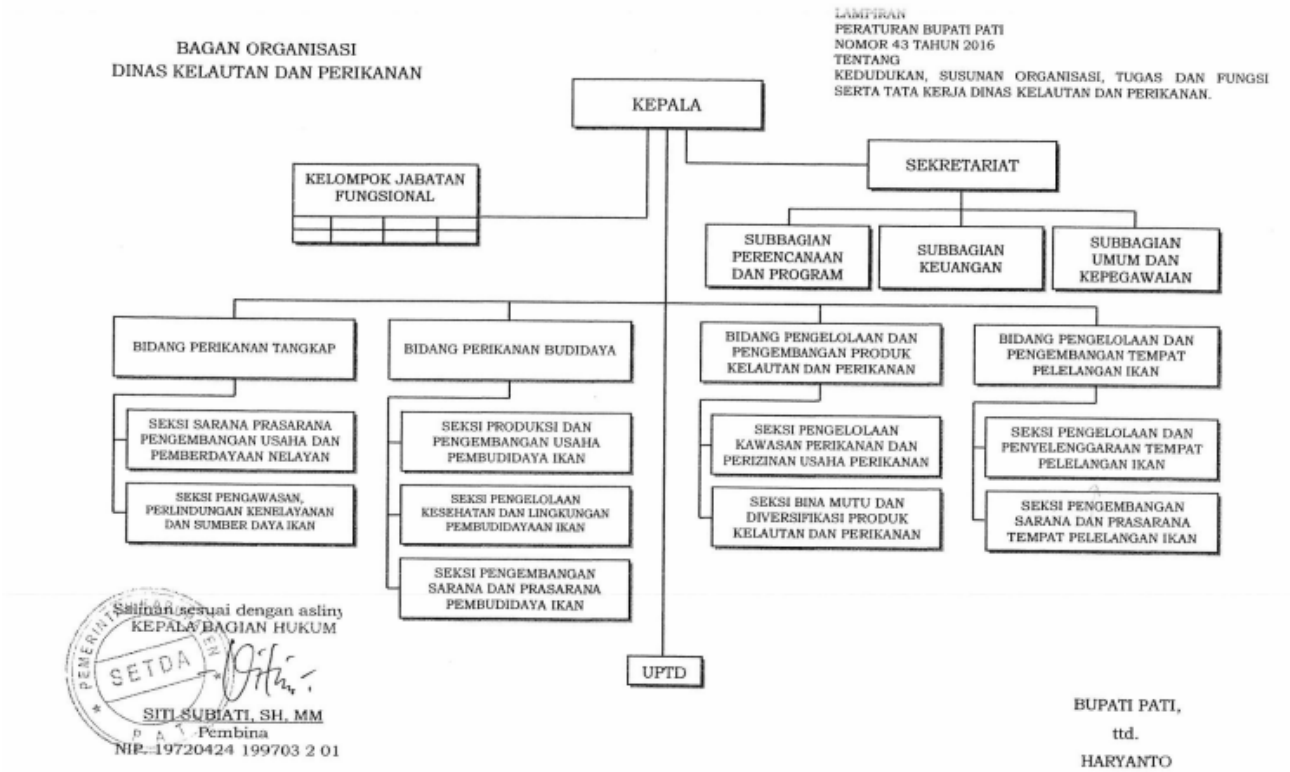
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

G. Kelompok jabatan fungsional

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat di bawah ini :



Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 52 orang personel (data sampai Desember 2020), terdiri atas 36 orang laki-laki dan 16 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 55 orang, terdiri dari :

- 1. Pejabat Struktural : 20 orang
- 2. Fungsional Umum : 32 orang

Jumlah PNS menurut golongan

- 1. Golongan I : - orang
- 2. Golongan II : 21 orang
- 3. Golongan III : 25 orang
- 4. Golongan IV : 6 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 0 orang
2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 21 orang
4. Sarjana Muda : 2 orang
5. Sarjana : 18 orang
6. Pasca Sarjana : 11 orang

Tenaga harian lepas berjumlah 150 orang terdiri dari 20 orang tenaga harian lepas kantor, 120 tenaga harian lepas TPI dan 10 orang tenaga harian lepas BBI dan Tambak Dinas. Selain itu juga didukung adanya jabatan fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 18 orang dan 17 orang Penyuluh Perikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

Disamping sumber daya manusia, sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.1

Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	10	Baik
2	Sepeda motor dinas	62	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	9	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	Excavator/ Bego	2	Baik
7	Kapal pemadam kebakaran	1	Baik
8	Alat2 laboratorium	33	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
9	Mesin ketik manual	4	Baik
10	Almari	90	Baik
11	Meja	219	Baik
12	Kursi	737	Baik
13	Filling kabinet	31	Baik
14	Tabung pemadam	7	Baik
15	Timbangan	12	Baik
16	Lemari es	5	Baik
17	Freezer	1	Baik
18	Komputer/ PC	36	Baik
19	Laptop	65	Baik
20	Printer	68	Baik
21	AC	34	Baik
22	LCD proyektor	9	Baik
23	Kamera digital	8	Baik
24	Handycam	3	Baik
25	Wireless	3	Baik
26	Sound system	7	Baik
27	Televisi	4	Baik
28	Mesin finger print	12	Baik
29	Mesin potong rumput	2	Baik
30	Rak Arsip	8	Baik
31	CCTV	30	Baik
32	Hand phone	4	Baik
33	TV	9	Baik
34	Pompa Pemadam	1	Baik
35	Thermometer	15	Baik
36	Penghancur Kertas	2	Baik
37	Sorong	1	Baik

Tabel 1.2
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Juwana Unit I	6.463	2.325	
3	TPI Juwana Unit II	40.000	3.680	
4	TPI Banyutowo	2.351	2.351	

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Ket
5	TPI Puncel	420	214	
6	TPI Sambiroto	506	132	
7	TPI Margomulyo	271	84	
8	TPI Pecangaan	300	275	
9	TPI Alasdowo	120	72	
10	BBI Brati	14.180	639	
11	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
12	BBI Tlogowungu	19.789	178	
13	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan Handling splis
15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 mil
- Luas Tambak Garam : 2.901.62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 247,80 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 21 desa

- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Berbadan Hukum	:	130 KUB
- KUB BH Kemenkumham	:	30 KUB
- KUB BH Notaris	:	40 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

Peran seperti tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan hasil yang baik karena keberhasilannya dalam penerapan manajemen instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Strategi yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor di lingkungan internal maupun eksternal dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai proses penetapan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, strategi merupakan perwujudan dari koordinasi dalam implelementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Koordinasi dan komunikasi akan mencairkan kebekuan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Implementasi koordinasi menjadi lebih sulit dengan adanya ego sektoral, prioritas alokasi sumberdaya dan lain-lain.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar.

Penyampaian informasi secara tertulis, periodik dan melembaga mutlak diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan latar belakang tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

1.4 Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Berdasarkan profil perikanan didapatkan gambaran bahwa terdapat peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pati. Adapun tantangan dalam pelayanan adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan;
- b) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan;
- c) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- d) Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- e) Tingginya harga pakan ikan;
- f) Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Promosi GEMARIKAN;
- b. Berkembangnya industri perikanan;
- c. Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan;
- d. Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan;

- e. Berkembangnya teknologi pergaraman;
- f. Pembangunan gudang garam dan koperasi garam.

Berdasarkan peluang dan tantangan pengembangan di Kabupaten Pati dapat dirumuskan dalam suatu isu strategis. Isu strategis merupakan permasalahan berisi gabungan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar ataupun sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Merujuk pada tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Pati dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang besar serta amanah mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat, maka isu strategis yang dirumuskan adalah:

1. Peningkatan produktifitas perikanan tangkap, budidaya dan garam
2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
3. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan ikan
4. Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
5. Penerapan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan

1.5 Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Perencanaan Kinerja;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2017 – 2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang mencakup visi, misi, tujuan, program dan sasaran serta strategi pencapaian program akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian program target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukung akan dijelaskan dalam perencanaan kinerja tahun 2020.

Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

Tujuan :

Meningkatnya Daya Saing Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran :

1. *Meningkatnya Produktivitas di sektor Kelautan dan Perikanan*
2. *Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk*

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2020, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya daya saing daerah	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan (%)	3,49
2	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap (ton/kapal/tahun)	13,27
		Produktivitas perikanan budidaya (ton/Ha/tahun)	3,91
		Produktivitas garam rakyat (ton/Ha/musim produksi)	89,45
3	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan (%)	3,49

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2020 strategi dan prioritas APBD tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 12.685.342.400,- (dua belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang dirinci dalam program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Nama Program	Jumlah Anggaran	
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	407.833.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Rp.	32.719.000,00
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Rp.	63.742.400,00
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Rp.	164.156.000,00
Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	1.203.602.000,00
Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	10.005.410.000,00
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Rp.	76.372.000,00
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp.	195.412.000,00
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Air Tawar	Rp.	536.114.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati dalam pelayanan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan
2. Produktivitas perikanan tangkap
3. Produktivitas perikanan budidaya
4. Produktivitas garam rakyat
5. Pertumbuhan angka konsumsi ikan

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati hingga tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Daya Saing Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan. Untuk capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2020

Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	
Target tahun 2020	3,49%
Realisasi tahun 2020	3,09%
Capaian	88,54%

Dari tabel 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan sebesar 3,49% belum dapat tercapai.

Komoditas unggulan sektor perikanan terdiri dari hasil perikanan tangkap baik yang berupa hasil tangkapan nelayan di laut maupun di perairan umum, perikanan budidaya baik budidaya air payau maupun air tawar, garam rakyat serta hasil olahan produk perikanan.

Guna mendukung keberhasilan dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan dengan tolak ukur keberhasilan berupa produktivitas perikanan tangkap, produktivitas perikanan budidaya dan produktivitas garam rakyat.
2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. Sasaran kedua ini untuk mengakomodir hasil dari pengolahan produk kelautan dan perikanan dimana keberhasilan dari peningkatan produktivitas ini tidak lain dilihat dari masyarakat terhadap produk-produk kelautan dan perikanan.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Produktivitas perikanan tangkap; (2) Produktivitas perikanan budidaya; dan (3) Produktivitas garam rakyat. Untuk capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap	ton/kapal /tahun	13,27	60,17	453,43%
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha /tahun	3,91	16,11	412,02%
		Produktivitas garam rakyat	ton/ha /musim panen	89,45	66,62	74,48%

1. Produktivitas Perikanan Tangkap

Produktivitas perikanan tangkap tahun 2020 realisasinya sebesar 60,17 ton/kapal/tahun. Jika dilihat dari target 2020 sebesar 13,27 ton/kapal/tahun, indikator produktivitas perikanan tangkap sudah mencapai target dengan capaian sebesar 453,43%.

Ada sedikit perbedaan sumber data yang disajikan untuk perhitungan indikator ini. Awal tahun pelaksanaan renstra yaitu tahun 2018 data produksi yang dipakai dalam perhitungan mengambil data produksi tangkap yang dilelang di TPI saja sedangkan mulai tahun 2019 selain menggunakan data produksi tangkap yang masuk di pelelangan TPI digunakan juga data estimasi produksi tangkap yang tidak melalui proses pelelangan di TPI dengan mempertimbangkan jumlah kapal yang berlayar dan hasil perikanan tangkap yang langsung dijual ke masyarakat baik melalui pasar maupun coldstorage yang tersebar di Kabupaten

Pati. Hal inilah yang menyebabkan capaian untuk indikator produktivitas perikanan tangkap sangat besar.

Selain itu untuk perhitungan awal dihitung secara global dengan membandingkan hasil produksi tangkap secara global dengan jumlah kapal yang ada tanpa memperhatikan produktivitas kapal yang tentunya berbeda antara kapal yang bermesin besar dengan kapal nelayan tradisional begitupun juga antara perikanan tangkap laut dengan perikanan tangkap perairan umum. Dengan memperhatikan hal tersebut maka mulai tahun 2019 dipakai perhitungan rata-rata untuk menghitung produktivitas perikanan tangkap.

Tahun 2020 produktivitas dari perikanan tangkap dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah produksi tangkapan ikan dengan jumlah armada kapal yang ada. Produktivitas tangkap terbagi menjadi tangkap laut dan tangkap perairan umum dimana untuk tangkap laut dalam menghitung produktivitasnya dirata-rata antara hasil tangkapan kapal bermesin diatas 10GT dengan tangkapan dari kapal bermesin di bawah 10GT. Sedangkan untuk menghitung produktivitas tangkap di perairan umum dihitung dulu rata-rata produktivitas tangkapan di waduk dan hasil tangkapan di sungai. Setelah ditentukan hasilnya antara produktivitas tangkapan laut dan perairan umum kemudian dirata-rata sehingga ketemu berapa produktivitas tangkap.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari perhitungan berikut ini :

<i>Tangkap Laut</i>	<i>Produksi (Ton)</i>	<i>Jml KPL</i>	<i>Rata2 Produksi/Th</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Pelabuhan</i>	93.816	407	230,51	Diatas 10 GT
<i>Non Pelabuhan</i>	1.254	133	9,43	Dibawah 10 GT
<i>Rata-rata</i>			119,97	

<i>Tangkap perairan umum</i>	<i>Produksi (Ton)</i>	<i>Kapal</i>	<i>Rata2 Produksi/Th</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Sungai</i>	115	178	0,65	KTM,NTP,PMT
<i>Waduk</i>	21	252	0,08	KTM,NTP
<i>Rata-rata</i>			0,36	

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata produktivitas tangkap} &= (119,97 + 0,36)/2 \\ &= \mathbf{60,17 \text{ ton/kapal/th}} \end{aligned}$$

2. Produktivitas Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya tahun 2020 realisasinya sebesar 16,11 ton/Ha/tahun. Jika dilihat dari target 2020 sebesar 3,91 ton/Ha/tahun, indikator produktivitas perikanan tangkap sudah mencapai target dengan capaian sebesar 412,02%.

Sama halnya dengan indikator sebelumnya yaitu produktivitas perikanan tangkap dimana cara perhitungannya berbeda dengan perhitungan di awal waktu pelaksanaan renstra, cara perhitungan indikator produktivitas perikanan budidaya juga berbeda mengingat perikanan budidaya dibedakan menjadi perikanan budidaya air tawar dan perikanan budidaya air payau yang bisa dipastikan produktivitasnya jauh berbeda. Untuk perhitungan produktivitas di tahun 2018 produksi perikanan dihitung secara global dan mulai tahun 2019 dihitung berdasarkan rata-rata sehingga menyebabkan capaian tahun 2020 sangat besar.

Tahun 2020 produktivitas perikanan budidaya diukur dengan cara menghitung rata-rata produktivitas perikanan budidaya air tawar (kolam) dengan produktivitas air payau (tambak). Untuk menghitung produktivitas kolam maupun tambak adalah dengan membandingkan jumlah produksi perikanan budidaya dengan luasan lahan budidaya baik lahan tambak maupun kolam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned}\text{Produktivitas budidaya tambak} &= \frac{\text{produksi budidaya tambak}}{\text{luas lahan tambak}} \\ &= \frac{33.967,68}{10.558} = 3,22 \text{ ton/Ha/th}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Produktivitas budidaya kolam} &= \frac{\text{produksi budidaya kolam}}{\text{luas lahan kolam}} \\ &= \frac{12.607,96}{435} = 29,01 \text{ ton/Ha/th}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata produktivitas budidaya} &= (3,22 + 29,01)/2 \\ &= 16,11 \text{ ton/ha/th}\end{aligned}$$

3. Produktivitas Garam Rakyat

Produktivitas garam rakyat tahun 2020 realisasinya sebesar 66,82 ton/Ha/musim panen. Jika dilihat dari target 2020 sebesar 89,45 ton/Ha/musim panen, indikator produktivitas garam rakyat belum mencapai target dengan capaian sebesar 74,48%.

Besarnya produktivitas garam rakyat sangat berkaitan dengan produksi garam tiap musim produksi garam. Produksi garam tiap tahunnya tidak bisa diprediksi karena produksi garam sangat terpengaruh terhadap cuaca dan panas matahari. Untuk tahun 2020 musim pengolahan garam rakyat berada pada bulan juli s.d desember sedangkan diluar bulan itu tetap ada produksi hanya saja terbatas untuk pengolahan garam dengan sistem tunnel dan rumah prisma.

Produktivitas garam rakyat diukur dari produksi garam rakyat dibagi dengan luas lahan tambak garam. Untuk realisasi produktivitas garam dapat dilihat dari perhitungan berikut ini :

Produktivitas Garam :

$$\frac{\text{Jumlah produksi garam rakyat}}{\text{luas lahan garam}} = \frac{193.307}{2.902} = 66,62 \text{ ton/ha/th}$$

Hasil pengukuran kinerja diatas hampir semua indikator dalam sasaran 1 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 kecuali indikator ketiga yaitu produktivitas garam rakyat. Tantangan dan hambatan yang mempengaruhi ketercapaian indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca;
- b. Pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah;
- c. Harga jual garam yang anjlok dikarenakan kebijakan impor garam dari pemerintah.

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu pertumbuhan angka konsumsi ikan. Untuk capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	%	3,49	0,31	8,88

Pertumbuhan angka konsumsi ikan tahun 2020 realisasinya sebesar 0,31%. Jika dilihat dari target 2020 sebesar 3,49%, indikator pertumbuhan angka konsumsi ikan belum mencapai target dengan capaian sebesar 8.88%.

Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pati adalah Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Perhitungan AKI tahun 2019 dan 2020 secara nasional belum dapat dilakukan mengingat adanya pandemi covid-19. Rumus perhitungan untuk angka konsumsi ikan adalah $A+B+C$ dimana A adalah Konsumsi di rumah tangga, B adalah konsumsi luar rumah tangga, dan C adalah konsumsi tidak tercatat. Data A dan B berasal dari data BPS sedang data C berasal dari pendataan kabupaten.

Indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan dihitung dengan cara mengurangkan AKI tahun ini dengan AKI tahun lalu kemudian jumlah pengurangan dibandingkan dengan tahun lalu dikali 100%. Dengan memperhatikan konsumsi ikan di Kabupaten Pati, estimasi untuk angka konsumsi ikan tahun 2019 AKI

Kabupaten Pati sebesar 42,62 kg/kapita/tahun dan di tahun 2020 AKI Kabupaten Pati sebesar 42,75 kg/kapita/tahun. Ada kenaikan sebesar 0,31% jika dibandingkan tahun 2019. Untuk realisasi indikator pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan dapat dilihat dari perhitungan berikut ini :

Pertumbuhan AKI :

$$\frac{(AKI \text{ tahun } 2020 - AKI \text{ tahun } 2019)}{AKI \text{ tahun } 2019} = \frac{(42,75 - 42,62)}{42,62} = 0,31 \%$$

Walaupun secara perhitungan tahun 2020 belum memenuhi target tetapi Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati merupakan capaian tertinggi di Jawa Tengah selama periode pelaksanaan Renstra 2017 – 2022.

Tantangan dan hambatan yang mempengaruhi ketidak tercapaian indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah;
- b. perekonomian yang terpuruk menyebabkan daya beli masyarakat terhadap ikan juga menurun;
- c. terdapat banyak pilihan produk substitusi yang harganya lebih ekonomis dibanding dengan produk olahan ikan;

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Sehingga perbandingan capaian kinerja tahun ini akan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019 periode Renstra 2017-2022. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui trend capaian

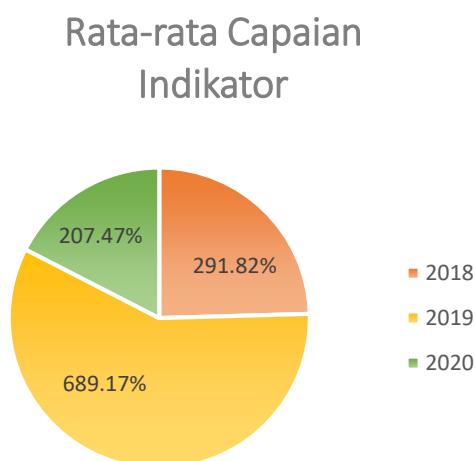
kinerja setiap indikator sasaran yang telah di capai. Pengukuran Capai Kinerja pada masing – masing indikator kinerja sasaran merupakan kontrol untuk mengetahui efektivitas upaya pembangunan yang telah dilakukan selama periode perencanaan. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN		2020		CAPAIAN
			2018	2019	TARGET	REALISASI	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya daya saing daerah	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	1.087%	2.582%	3,49	3,09	88,54%
2	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap	68,54%	203,10%	13,27	60,17	453,43%
		Produktivitas perikanan budidaya	103,08%	411,28%	3,91	16,11	412,02%
		Produktivitas garam rakyat	151,33%	148,32%	89,45	66,62	74,48%
3	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	48,99%	101,14%	3,49	0,31	8,88%

Jika dilihat dari hasil capaian di tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2020 untuk mencapai 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dengan 5 (lima) indikator kinerja utama perangkat daerah. Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah 207,47%.

Hasil perbandingan antara tahun 2018, 2019 terlihat jelas ada kenaikan yang sangat signifikan sedangkan untuk tahun 2020 trend cenderung turun. Pada tahun 2018 ada 2 indikator yang belum mencapai 100%, untuk tahun 2019 semua indikator melebihi capaian 100% sedangkan untuk tahun 2020 ada tiga indikator yang belum mencapai 100%. Untuk rata-rata capaian tahun 2018 adalah sebesar 291,82%, tahun 2019 sebesar 689,17% dan tahun 2020 sebesar 207,47%. Ada kenaikan sebesar 397,35% dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan penurunan sebesar 481,70%.



Terdapat 9 (Sembilan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati.

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2020 secara umum sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir.
 - b. Pengembangan Usaha Garam Rakyat.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
 - a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan.
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
 - a. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

4. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
 - a. Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut;
 - b. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
 - b. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan;
 - d. Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan;
 - e. Pembinaan dan Pengelolaan Prasarana Budidaya.
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap;
 - b. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap;
 - e. Normalisasi Alur Pelayaran TPI;
 - f. Pengelolaan Sarana TPI;
 - g. Pembangunan Turap Dermaga.
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
 - a. Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan.
8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - b. Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - c. Pelayanan Perijinan Usaha Perikanan.
9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - a. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
 - b. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;

3.3. Hambatan dan Rencana Aksi

Dalam pencapaiannya ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Tantangan dan hambatan dalam pengukuran kinerja ini diantaranya:

1. ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah;
2. faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) dan perubahan arah angin;
3. belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan, penangkapan ikan, dan produksi garam;
4. penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan wilayah penangkapan ikan;
5. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya ikan dan tambak garam untuk kegiatan non sektor perikanan;
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan;
7. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan;
8. harga jual garam rakyat yang rendah karena adanya kebijakan impor garam dari luar negeri;
9. perekonomian yang terpuruk di masa pandemi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap ikan juga menurun;
10. keberagaman produk substitusi yang harganya lebih ekonomis dibanding dengan produk olahan ikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang akan dijadikan Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain :

a. Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap

Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan keberdayaan nelayan dengan peningkatan ketrampilan, keikutsertaan dalam asuransi nelayan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi penangkapan ikan, selain itu meningkatkan daya dukung ekosistem sumberdaya perairan dan sumberdaya ikan dan diikuti dengan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya

Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi dan standarisasi sistem budidaya perikanan serta diversifikasi komoditas, keikutsertaan dalam asuransi pembudidaya, standarisasi sistem perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih ikan, pengelolaan lingkungan budidaya serta pengendalian hama dan penyakit ikan. Dan kemudian diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana budidaya perikanan.

c. Meningkatkan produktivitas garam

Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan ketrampilan melalui sosialisasi, pembinaan, penerapan teknologi terintegrasi garam, penerapan teknologi rumah prisma dan tunnel, pengembangan teknologi biomembran kemudian diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan garam.

d. Meningkatkan Konsumsi Makan Ikan Masyarakat

Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan mutu hasil olahan ikan melalui pembinaan mutu (termasuk penjaminan higienitas serta sanitasi) dan diversifikasi olahan perikanan, ikut mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui sosialisasi gerakan makan ikan dengan menggandeng para pengolah ikan dan kader-kader PKK tingkat Kabupaten sampai Desa.

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan termasuk aspek akuntabilitas manajerial dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan. Dana kegiatan ini merupakan indikator input (masukan) dari 24 kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang tercakup dalam 9 Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan anggaran sebesar Rp. 12.685.342.400,00 (dua belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.318.312.113,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga belas rupiah) atau sebesar 97,11%. Dengan capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa semua kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan sangat baik.

Adapun realisasi anggaran yang terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
3.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir			
3.01 . 15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	72.765.000	67.977.500	93,42
3.01 . 15.08	Pengembangan usaha garam rakyat	335.068.000	332.998.000	99,38
3.01 . 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			
3.01 . 16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	32.719.000	32.639.000	99,76
3.01 . 17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut			
3.01 . 17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	63.724.400	63.649.400	99,88
3.01 . 18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut			
3.01 . 18.01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	75.000.000	74.745.000	99,66
3.01 . 18.04	Pengembangan mitigasi bencana laut dan prakiraan iklim laut	89.156.000	87.919.000	98,61
3.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan			
3.01 . 20.01	Pengembangan bibit ikan unggul	566.477.000	559.985.000	98,85
3.01 . 20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	226.500.000	224.400.000	99,07

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
3.01 . 20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	241.500.000	241.055.950	99,82
3.01 . 20.19	Pembinaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	64.900.000	64.705.000	99,70
3.01 . 20.41	Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan	104.225.000	104.120.450	99,90
3.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap			
3.01 . 21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1.915.000.000	1.834.546.085	95,80
3.01 . 21.02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	791.508.000	767.534.150	96,97
3.01 . 21.03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	2.558.678.000	2.542.761.150	99,38
3.01 . 21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	3.845.000.000	3.672.425.128	95,51
3.01 . 21.11	Pembangunan turap dermaga	396.088.000	393.402.000	99,32
3.01 . 21.31	Normalisasi Alur Pelayaran TPI	180.000.000	178.338.000	99,08
3.01 . 21.32	Pengelolaan Sarana TPI	319.136.000	316.255.000	99,10
3.01 . 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			
3.01 . 22.01	Kajian sistem penyuluhan perikanan	76.372.000	73.889.300	96,75
3.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
3.01 . 23.01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	48.003.000	47.958.000	99,91
3.01 . 23.26	Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	122.409.000	119.144.000	97,33
3.01 . 23.27	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	25.000.000	24.335.000	97,34
3.01 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			
3.01 . 24.01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	48.083.000	48.033.000	99,90
3.01 . 24.17	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	488.031.000	445.497.000	91,28

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 merupakan hasil penilaian Pelaksanaan Program & Kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2020 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada tahun 2020 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 207,47%. Hasil ini telah mencapai target sasaran tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang.

Sedangkan capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya daya saing daerah	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	Persen	3,49	3,09	88,54%
2	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap	ton/kapal	13,27	60,17	453,43%
		Produktivitas perikanan budidaya	/tahun	3,91	16,11	412,02%
		Produktivitas garam rakyat	ton/ha	89,45	66,62	74,48%
3	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	/tahun	3,49	0,31	8,88%

B. S A R A N

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi yang tinggi dari aparat yang menangani sektor perikanan dan kelautan.
2. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan tergantung pada partisipasi seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka faktor kerja sama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.
3. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya petani tambak, petani kolam, pembenih, petambak garam, bakul dan pengolah ikan dan nelayan sebagai objek pembangunan perikanan dan kelautan.